

Mechanisms of Symbolic Violence against Learners with Disabilities in an Inclusive Primary School in View of Pierre Bourdieu's Theory

[Mekanisme Kekerasan Simbolik terhadap Anak Difabel di Sekolah Dasar Inklusif Ditinjau dari Teori Pierre Bourdieu]

Nur Mashlichah Ilma¹⁾, Kemil Wachidah ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: kemilwachidah@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to examine the mechanism of symbolic violence against students with disabilities in inclusive elementary schools. Qualitative research with a case study approach, this research was conducted at SD Muhammadiyah 1 Candi Labschool Umsida, with participants consisting of students with disabilities, non-disabled students, and 6th grade teachers. The results showed that the indicators of social, economic, and arena capital had a significant influence on the occurrence of symbolic violence against students with disabilities. Disabled learners from families with low economic capital often experience discrimination in social interactions and the learning process. Non-disabled learners with high economic capital do not realize that their actions can be considered a form of symbolic violence that harms disabled learners psychologically.

Keywords - symbolic violence; learners with disabilities; Pierre Bourdieu's theory

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme kekerasan simbolik terhadap peserta didik difabel di sekolah dasar inklusif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Candi Labschool Umsida, dengan partisipan terdiri dari peserta didik difabel, non-difabel, dan guru kelas 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator modal sosial, ekonomi, dan indikator arena memiliki pengaruh signifikan dalam terjadinya kekerasan simbolik. Peserta didik difabel dari keluarga dengan modal ekonomi rendah sering kali mengalami diskriminasi dalam interaksi sosial dan proses pembelajaran. Peserta didik non-difabel dengan ekonomi tinggi, tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik yang merugikan peserta didik difabel secara psikologis.

Kata Kunci – kekerasan simbolik; peserta didik difabel; teori Pierre Bourdieu

I. PENDAHULUAN

Kekerasan di sekolah dasar menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan[1]. Betapa pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan sejak dulu, serta mengajak semua pihak untuk berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik, justru seringkali menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan[2]. Kekerasan di sekolah dasar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari fisik hingga psikologis. Namun, kekerasan tidak selalu tampak kasat mata, seringkali kekerasan terjadi dalam bentuk yang lebih halus atau tidak terlihat. Bentuk kekerasan itu disebut oleh Pierre Bourdieu adalah kekerasan simbolik. Kekerasan semacam ini merupakan perilaku dengan menggunakan banyak cara untuk melukai perasaan dan dapat merugikan orang menyakitkan[3]. Sekolah sebagai sebuah arena yang berpotensi untuk terjadi sebuah praktik kekerasan simbolik. Ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan selalu memakan korban baik individu maupun kelompok etnis, agama, minoritas, kelas, sosial, dan gender. Faktanya, para korban berada dalam posisi yang dirugikan dan rentan secara struktural, tidak mampu membela diri atau menerima perlindungan. Hal ini menempatkan korban pada posisi dominan. Bourdieu mengemukakan bahwa di dalam dominasi simbolis, terdapat bagaimana dominasi dapat diterapkan dan dipertahankan sebagai sikap tunduk atau sebagai akibat dari kekerasan simbolis, kekerasan halus, tak terasakan, tak dapat dilihat bahkan oleh korbannya sendiri. Asumsi dari dominasi itu sendiri dapat berupa bahasa, gaya hidup, cara berpikir, berbicara atau bertindak, ciri khas, stigma. Sedangkan yang paling efektif secara simbolis menurut Bourdieu ialah ciri tubuh seperti warna kulit[4].

Kekerasan simbolik memang bukan bentuk kekerasan yang mudah dilihat, namun sebenarnya bentuk kekerasan ini sangat mudah diamati. Bourdieu mengatakan bahwa kekerasan simbolik merupakan kekuasaan yang dapat dikendalikan dengan mengenali objeknya. Hal ini mengacu pada kekuasaan seperti ekonomi, politik, budaya, atau lainnya yang memiliki kapasitas yang tidak dapat dikenali bentuk aslinya. Menurut Pierre Bourdieu, terjadinya kekerasan simbolik terjadi karena tiga hal diantaranya yaitu habitus, modal, dan arena[5]. Sekolah tentu mempunyai kebiasaan, modal, dan tempat-tempat yang berbeda seperti kantin, lapangan bermain, dan sebagainya. Ketiga faktor

inilah yang mempengaruhi cara berpikir setiap orang. Bourdieu mengartikan habitus ialah perilaku yang terkait dengan kondisi keberadaan suatu kelas [6].

Dengan demikian, habitus merupakan hasil keterampilan yang merupakan tindakan praktis dalam arti belum tentu disadari, yang dapat diartikan sebagai keterampilan yang tampak ilmiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Secara sederhana, habitus dapat diartikan sebagai gaya hidup, nilai-nilai, karakter, dan harapan suatu kelompok sosial tertentu. Gaya hidup berarti sesuatu yang secara tidak langsung menjadi suatu kebiasaan. Habitus didefinisikan sebagai persepsi, pemikiran, atau perilaku yang diperoleh dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal berikutnya yang dapat memunculkan adanya kekerasan simbolik yaitu modal. Bourdieu mendefinisikan modal sebagai hubungan sosial yang ada dalam sistem pertukaran, baik material maupun simbolik, tanpa perbedaan[7]. Modal pada sistem pendidikan seringkali memproduksi ketidaksetaraan sosial melalui kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai dan perspektif kelompok dominan. Peserta didik dari latar belakang sosial yang berbeda memiliki akses yang tidak sama terhadap modal budaya, sehingga mereka mengalami kesulitan yang berbeda dalam beradaptasi dengan sistem pendidikan. Bordieu menjelaskan bahwa arena menunjukkan tempat pertarungan kekuatan, atau posisi di mana para pelaku bersaing atau berjuang. Dalam konteks peserta didik difabel, kekerasan simbolik ini seringkali terwujud dalam bentuk stigma, diskriminasi, dan ekspektasi rendah yang secara tidak sadar diterima oleh masyarakat, bahkan oleh peserta didik difabel itu sendiri[8]. Konsekuensinya, peserta didik difabel seringkali mengalami pembatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan sosial lainnya.

Peserta didik difabel seringkali menjadi sasaran kekerasan simbolik yang dapat menghambat potensi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Stigma dan deskriminasi yang melekat pada disabilitas menciptakan lingkungan yang tidak inklusif dan dapat menyebabkan peserta didik difabel merasa terisolasi dan tidak berdaya. Peserta didik difabel seringkali dipandang sebagai “berbeda” atau “kurang” dibandingkan dengan peserta didik-peserta didik non-difabel lainnya. Pemikiran yang seperti ini dapat mengarah pada deskriminasi, pengucilan, bahkan kekerasan. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman pada Surat At-Tin Ayat 4:

أَلَّا خَلَقْنَا إِلَّا سَبَّابَنَ فِي أَحْسَنِ شَرْفٍ

Latin: Laqad khalaqnal-insana fi ahsani taqwim(in).

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik."

Melalui ayat ini, Allah SWT. berfirman bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk sempurna, jauh lebih sempurna dari makhluk apapun[9]. Pada intinya manusia normal ataupun difabel semua merupakan ciptaan Allah SWT. yang paling sempurna. Salah satu konteks dimana kekerasan simbolik terhadap peserta didik difabel sering terjadi di dunia pendidikan. Praktik-praktik seperti penempatan dalam kelas khusus, rendahnya ekspektasi guru, dan kurangnya akses terhadap kurikulum yang inklusif merupakan bentuk kekerasan simbolik yang dapat menghambat perkembangan peserta didik difabel.

Salah satu bentuk keberagaman manusia adalah adanya keberadaan peserta didik disabilitas atau difabel[10]. Keterbatasan peserta didik difabel dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-undang Pasal 143 nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas dijelaskan bahwa hak penyandang disabilitas salah satunya yaitu diberi penghormatan martabat dan tanpa diskriminasi[11]. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mereka, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan memberdayakan semua peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka. Keterbatasan menyebabkan mereka yang berkebutuhan khusus dianggap suatu masalah bagi peserta didik yang normal, sehingga memicu pikiran untuk melakukan sebuah perilaku kekerasan atau aksi perundungan[12]. Tentunya, peserta didik difabel memiliki kesulitan dalam beradaptasi dan mengikuti proses perkembangan yang sama dengan peserta didik-peserta didik non-difabel lainnya. Dalam era pendidikan inklusi, semakin banyak peserta didik-peserta didik dengan disabilitas yang bersekolah bersama teman sebaya mereka yang tidak memiliki disabilitas[13]. Namun, tidak semua peserta didik dengan disabilitas menunjukkan perilaku yang sama. Sangat penting untuk memahami variasi perilaku ini untuk membuat lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua peserta didik.

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan mekanisme dan reproduksi kekerasan simbolik yang terjadi disekolah-sekolah di Kota Palu[14], kemudian penelitian lain juga menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan simbolik sesuai dengan teori Pierre Bourdieu[15]. Setelah menguraikan konsep kekerasan simbolik, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana mekanisme kekerasan simbolik terhadap peserta didik difabel di sekolah dasar inklusif ditinjau dari Teori Pierre Bourdieu.

II. METODE

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Dianggap paling efektif untuk mengungkap jenis kekerasan simbolik yang terjadi terhadap peserta didik difabel, metode ini dipilih. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang signifikan tentang kekerasan simbolik. Penelitian kualitatif yang diawali dengan

metode berpikir induktif adalah penelitian yang didasarkan pada observasi partisipan secara objektif terhadap gejala dan sebuah kasus. Studi kasus adalah studi penelitian di mana seorang peneliti mempelajari suatu kasus pada waktu tertentu dan dalam konteks kegiatan tertentu, mengumpulkan informasi yang rinci dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu[16]. Desain penelitian studi kasus ditemukan di banyak bidang, terutama dalam evaluasi, di mana peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap suatu kasus, yang biasanya berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, atau orang. Miles dan Huberman menyatakan bahwa studi kasus merupakan kajian yang rinci disuatu latar, suatu objek, dan suatu peristiwa tertentu. Studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realita di balik sebuah kasus[17]. Dengan mencari data melalui aktifitas wawancara dan pengamatan di lapangan secara deskriptif untuk mendapatkan temuan data yang berkecukupan. Pendekatan studi kasus menggali permasalahan atau kasus khusus serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan secara terperinci menggunakan prosedur pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data menggunakan triangulasi diantaranya observasi, wawancara, angket, serta dokumen. Alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar angket.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No.	Indikator	Sub-Indikator
1.	Habitus	<p>Individu merasa jabatan yang diterima merupakan hasil kemampuan atau usaha diri sendiri</p> <p>Individu merasa terdapat kelompok paling populer didalam kelas</p> <p>Individu menganggap ketidakadilan sebagai hal yang biasa atau hal yang wajar</p> <p>Individu merasa bahwa harus patuh pada perintah atau aturan suatu kelompok populer walaupun itu merugikan mereka</p> <p>Individu cenderung menghindari konflik dan berdiam diri</p>
2.	Modal	<p>Individu yang memiliki modal ekonomi yang tinggi seringkali memiliki lebih banyak pengaruh dalam menentukan nilai-nilai sosial</p> <p>Individu dengan jaringan sosial yang luas cenderung memiliki lebih banyak peluang dan lebih mudah mempengaruhi opini orang lain</p> <p>Individu yang mempunyai modal budaya seringkali dianggap lebih pintar atau lebih berpendidikan</p> <p>Individu merasa bahwa apa yang telah diraih harus diakui oleh banyak pihak</p>
3.	Arena	<p>Individu merasa adanya pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan atau prestasi akademik dapat menciptakan stigma negatif terhadap peserta didik yang dianggap kurang mampu</p> <p>Individu merasa bahwa cara berinteraksi antara guru dan peserta didik dalam memberikan pujian atau perhatian lebih dapat menciptakan ketidaksetaraan</p> <p>Individu merasa terdapat suatu tempat disekolah yang membuat tidak nyaman atau takut</p> <p>Individu merasa bahwa aturan atau kebiasaan disekolah dapat menciptakan ketidakadilan</p>

Kemudian peneliti memilih guru kelas 6, satu peserta didik non-difabel dan satu peserta didik difabel kelas 6 di SD Muhammadiyah 1 Candi labschool Umsida (SD MICA) sebagai informan. Data primer dan sekunder ikumpulkan melalui analisis data model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi[18]. Reduksi data digunakan untuk mencari data yang sesuai dari sekian banyak hasil yang diperoleh dengan mengklasifikasi data. Dalam mengklasifikasikan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa aplikasi NVivo 12 Pro. Setelah melalui tahap reduksi, data akan disajikan dengan menghubungkan antara kasus untuk dianalisis apa yang terjadi di lokasi penelitian. Tahap terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil pengisian angket, wawancara, dan observasi terhadap guru kelas 6, peserta didik difabel dan non-difabel yang disertai dokumentasi, maka diperoleh temuan-temuan dalam penelitian terkait mekanisme kekerasan simbolik terhadap anak difabel di SD Muhammadiyah 1 Candi Labschool UMSIDA. Dari hasil observasi, ditemukan habitus atau kebiasaan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari cara peserta didik memilih teman dalam bermain, bergaul, dan berkomunikasi. Ketika observasi, peserta didik non-difabel berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi tinggi sehingga merasa lebih dominan atau berkuasa. Peserta didik non-difabel memberikan perintah dan larangan kepada peserta didik difabel. Kalimat yang dilontarkan seperti “ambilkan sapu itu!”, “pergi sana main di lapangan!”. Perintah dan larangan yang disampaikan peserta didik non-difabel harus dilaksanakan peserta didik difabel. Setelah kalimat perintah dan larangan dilontarkan, dapat dilihat bahwasannya peserta didik difabel cenderung ketakutan hingga pada akhirnya harus melaksanakan perintah dan larangannya. Peserta didik non-difabel yang berasal dari keluarga dengan ekonomi tinggi menunjukkan perilaku dominatif terhadap peserta didik difabel, seperti memberikan perintah dan larangan yang harus ditaati. Peserta didik difabel merespon perilaku tersebut dengan rasa takut dan kepatuhan, yang menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak setara di lingkungan sekolah.

Ketika observasi, juga ditemukan adanya sebuah program yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan, yaitu program “*International Experience Students*” ke luar negeri yang diadakan sekolah tiap tahunnya dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Pamflet Program International Experience Students

Menurut informasi dari ketiga informan menyatakan bahwa tidak seluruh peserta didik dapat mengikuti program tersebut. Program ini hanya untuk peserta didik dengan ekonomi tinggi atau bagi yang mampu. Sedangkan peserta didik difabel dengan ekonomi rendah tidak mampu mengikutiya. Program eksklusif ini secara tidak langsung menciptakan kesenjangan struktural dan menegaskan ketimpangan sosial antar peserta didik.

Berikutnya, hasil dari wawancara diketahui bahwa peserta didik non-difabel merasa memiliki posisi lebih tinggi karena prestasi dan dukungan orang tua, sementara peserta didik difabel merasa kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik dengan ekonomi tinggi percaya bahwa mereka memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan peserta didik difabel dengan ekonomi rendah. Peserta didik dengan ekonomi tinggi mendapatkan dukungan penuh dari orang tua untuk mengikuti bimbingan belajar dan kursus. Dari banyaknya program tambahan yang diikuti oleh peserta didik non-difabel dengan ekonomi tinggi, peserta didik non-difabel juga dapat mengikuti olimpiade dan mendapatkan juara yang dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Prestasi peserta didik non-difabel

Dukungan dari orang tua dengan ekonomi tinggi mampu menyediakan kebutuhan belajar secara optimal serta turut memperkuat motivasi dan rasa percaya diri peserta didik dalam belajar.

Selanjutnya, hasil dari pengisian angket oleh peserta didik difabel, non-difabel, dan guru kelas 6 divisualisasikan oleh word cloud.



Gambar 3. Word Cloud

Dari Gambar 3, disimpulkan bahwa peserta didik dengan modal ekonomi tinggi memiliki akses terhadap berbagai fasilitas pendidikan tambahan seperti bimbingan belajar, dan kursus. Sebaliknya, peserta didik difabel yang berasal dari ekonomi rendah mengalami kesulitan dalam mengakses alat bantu belajar dan perlengkapan tugas sekolah. Ketimpangan ini menyebabkan peserta didik difabel tertinggal dalam hal prestasi dan merasa kurang percaya diri. Word cloud ini menjelaskan modal ekonomi tinggi dapat mendukung prestasi peserta didik baik dibidang akademik maupun non-akademik, namun sebaliknya peserta didik dengan modal ekonomi rendah merasa kesulitan dalam proses pembelajaran meskipun sarana prasarana yang telah diberikan oleh sekolah sudah cukup baik untuk memfasilitasi peserta didik.

Sehingga dari hasil observasi, wawancara, dan angket kepada peserta didik difabel, non-difabel, dan guru kelas 6 disimpulkan bahwa kekerasan simbolik terjadi secara halus, namun nyata dalam praktik keseharian di lingkungan sekolah. Dari ketiga sumber data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan simbolik beroperasi melalui habitus, modal, dan arena sesuai dengan teori Pierre Bourdieu yang saling berkaitan membentuk struktur dominasi yang tidak disadari.

Pembahasan

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar ada tiga indikator kekerasan simbolik yang terjadi di SD Muhammadiyah 1 Candi Labschool Umsida yaitu habitus, modal, dan arena. Hal ini sesuai dengan Teori Pierre Bourdieu tentang kekerasan simbolik mencakup tiga aspek utama yang saling berinteraksi untuk mereproduksi dominasi secara halus dan tidak disadari dalam kehidupan sosial[19]. Indikator pertama yaitu habitus. Pierre Bourdieu menguraikan bahwa indikator habitus sebagai salah satu elemen kunci dalam memahami bagaimana struktur sosial terinternalisasi dan direproduksi secara halus dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui bahasa dan praktik simbolik. Dalam bukunya yang berjudul “Bahasa dan Kekuasaan Simbolik”, Bourdieu sangat menekankan bagaimana bahasa adalah media utama untuk mengaktualisasikan habitus. Bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga alat untuk menampilkan posisi sosial[20]. Tidak hanya dari segi bahasa, habitus juga dapat memunculkan adanya afeksi khususnya pada anak difabel, seperti pada SD MICA bentuk afeksi yang muncul berupa emosi dan sikap. Pernyataan tersebut didukung dari hasil penelitian [21] bahwa afeksi sama artinya dengan minat, emosi, sikap, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk emosi yang muncul adalah perasaan dikucilkan, sedangkan bentuk sikap yang ditunjukkan berupa gaya hidup. Gaya hidup peserta didik di sekolah dipengaruhi oleh latar belakang keluarga[22]. Dan gaya hidup peserta didik sangat mencerminkan habitusnya disekolah.

Di sisi lain, pada indikator modal yang sangat menonjol pada peserta didik di SD MICA adalah modal sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai pemikiran Bourdieu bahwa terdapat empat macam modal, diantaranya yaitu modal ekonomi, sosial, budaya, simbolik[23]. Indikator ini juga didukung dari penelitian lain yang menyebutkan adanya empat modal kekerasan simbolik, yang utama yaitu modal ekonomi dan sosial[24]. Status ekonomi peserta didik di sekolah tersebut beragam, mulai dari yang status ekonominya rendah hingga yang status ekonominya tinggi. Modal sosial dan ekonomi sangat menentukan keberhasilan peserta didik. Penelitian[25] menyepakati bahwa kesuksesan akademik anak dapat dipengaruhi dari modal sosial dan ekonomi keluarga. Selain itu, penelitian lain juga mendukung bahwa peserta didik yang berasal dari keluarga berpenghasilan tinggi lebih menunjang prestasi akademiknya dibandingkan dengan yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah[26].

Dengan adanya perbedaan modal sosial dan ekonomi, maka dapat menimbulkan kesenjangan terutama pada peserta didik difabel yang berasal dari ekonomi rendah. Seperti halnya pada salah satu program kegiatan di SD MICA, yaitu *“Program International Experience Students”*. Program ini hanya bisa diakses oleh peserta didik non-difabel yang mayoritas berasal dari kelompok sosial dengan ekonomi tinggi. Hal tersebut sesuai dengan sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa status sosial dan ekonomi peserta didik merupakan faktor penting yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan disekolah [27]. Peserta didik difabel memiliki hak untuk disamaratakan dalam hal pendidikan. Didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa peserta didik difabel berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan peserta didik lainnya[11] dan penelitian [28] menjelaskan bahwa hak-hak anak difabel harus dipenuhi dan disamaratakan bahkan disekolah inklusi. Kesetaraan bisa diperoleh melalui sekolah inklusi. Menurut

sebuah penelitian menjelaskan bahwa sekolah inklusi merupakan bentuk kesetaraan dalam pendidikan non-diskriminatif[29]. Selain itu, sekolah inklusi memberikan kesempatan pada seluruh peserta didik tanpa memandang status sosial dan ekonomi serta meminimalisir diskriminasi[30]. Pada SD MICA, sekolah ini berlabelkan inklusi namun penerapannya masih kurang, dikarenakan masih adanya diskriminasi yang terjadi melalui kekerasan simbolik terutama pada anak difabel.

Kekerasan simbolik dapat terjadi tidak hanya dikarenakan faktor habitus dan modal, melainkan juga karena arena yang mendukung terjadinya kekerasan simbolik. Arena merupakan tempat dimana seseorang melakukan pertarungan untuk memperebutkan sumber daya tertentu[31]. Sekolah yang seharusnya bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Hal ini didukung oleh penelitian lain, bahwa arena menjadi ruang kompetisi dan tempat terjadinya dominasi[32]. Penelitian ini menunjukkan bahwa arena sekolah menjadi salah satu poin penyebab terjadinya kekerasan simbolik terhadap peserta didik difabel. Arena yang sering dijadikan sebagai tempat pertarungan di SD MICA yaitu ruang kelas. Hal ini disepakati oleh penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa ruang kelas mampu menjadi arena terjadinya kekerasan simbolik[12], [33]. Pada arena, peserta didik tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga korban dari kekerasan simbolik. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa pada arena sekolah, peserta didik terjebak dalam siklus kekerasan simbolik, mereka menjadi korban dan pelaku dari kekerasan yang dibungkus dalam bahasa sehari-hari[34].

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Candi Labschool UMSIDA, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kekerasan simbolik terhadap peserta didik difabel terjadi melalui tiga indikator utama dalam kerangka teori Pierre Bourdieu, yaitu habitus, modal, dan arena. (1) Habitus: terjadi dominasi sosial dalam interaksi antar peserta didik; (2) Modal: modal sosial dan ekonomi memainkan peran penting; (3) Arena: lingkungan sekolah memperlihatkan adanya program yang menunjukkan kesenjangan ekonomi dan sosial antar peserta didik. Dilihat dari hasil temuan penelitian, disarankan agar pihak sekolah meningkatkan pelatihan bagi guru dan staf untuk mengenali serta mengatasi kekerasan simbolik, sekaligus memperkuat pendekatan inklusif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Sekolah juga perlu memastikan seluruh program pendidikan dapat diakses secara merata oleh semua peserta didik tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun kondisi fisik. Guru diharapkan membangun hubungan yang adil dan mendukung seluruh peserta didik, khususnya peserta didik difabel, dengan memberikan dukungan emosional dan ruang partisipasi yang setara. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam memberikan dukungan moral dan sosial agar anak-anak difabel memiliki keberanian dan kepercayaan diri dalam berinteraksi di lingkungan sekolah. Untuk pengembangan keilmuan, peneliti selanjutnya disarankan melakukan kajian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak partisipan dan lingkungan sekolah yang beragam guna memperkaya pemahaman tentang kekerasan simbolik dan strategi pencegahannya dalam konteks pendidikan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan penulis dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, yang paling dirindukan. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang ayah ibu impikan, walaupun berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan setelah kepergian kalian. Semoga ayah dan ibu bangga atas usaha yang adik lakukan dan bahagia di surganya Allah SWT. Kepada saudariku Sa'idah Shabbriyah, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis, terima kasih untuk perjalanan yang berharga bagi penulis sehingga terbentuk kemandirian serta menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

REFERENSI

- [1] P. Y. A. Dewi, "Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar," *Edukasi J. Pendidik. Dasar*, vol. 1, no. 1, p. 39, 2020, doi: 10.55115/edukasi.v1i1.526.
 - [2] T. F. Widiatmoko and K. P. S. Dirgantoro, "Pentingnya Peran Guru Sebagai Pembimbing Dalam Mengatasi Perilaku Perundungan Di Kelas [the Importance of the Teacher'S Role As a Guide in Overcoming Bullying in the Classroom]," *JOHME J. Holist. Math. Educ.*, vol. 6, no. 2, p. 238, 2022, doi: 10.19166/johme.v6i2.2072.
 - [3] G. Novarisa, "Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron," *Bricol. J. Magister Ilmu Komun.*, vol. 5, no. 02, p. 195, 2019, doi: 10.30813/bricolage.v5i02.1888.
 - [4] S. Arismunandar, "Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Kekerasan Simbolik," *Madani J. Polit. dan Sos. Kemasyarakatan*, vol. 12, no. 1, pp. 41–60, 2020.
 - [5] M. Reresi, B. A. Rahawarin, and W. Ngoranubun, "Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas," *J. Moral Kemasyarakatan*, vol. 8, no. 2, pp. 156–167, 2023, doi:

- 10.21067/jmk.v8i2.8177.
- [6] N. Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, vol. 01, no. 01. 2012.
- [7] P. Studi, P. Guru, S. Dasar, J. Ilmu, and U. Tadulako, “Habitus Dan Modal Pada Arena Pendidikan Di Sdn 11 Palu,” 2022.
- [8] A. Damayanto, W. Prabawati, and M. N. Jauhari, “Kasus Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi,” *J. ORTOPEDAGOGIA*, vol. 6, no. 2, p. 104, 2020, doi: 10.17977/um031v6i22020p104-107.
- [9] P. D. H. J. A. A. Amrultah and (HAMKA), “Tafsir Azhar : At-Tin,” no. ayat 2.
- [10] C. Cahyandari and B. S. Wangi, “Yang Mengalami Bullying,” *J. Magister Huk. Argum.*, vol. 8, pp. 23–30, 2022.
- [11] Karunia, “Pasal 143 UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas,” vol. 4, no. June, p. 2016, 2016.
- [12] R. H. L. Adinda Ajeng Apriliana, “Kekerasan Simbolik Oleh Guru PLB di SLB Negeri Gunung Sari Baureno Bojonegoro,” *J. Unesa*, pp. 1–22, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/38760>
- [13] N. Izzah, Y. Setianti, and O. Tiara, “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Inklusi,” *Murhum J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 2, pp. 272–284, 2023, doi: 10.37985/murhum.v4i2.236.
- [14] A. Firmansyah, J. A. Latief, I. Ahdiah, I. Lampe, and B. Ratu, “Mekanisme kekerasan simbolik dalam proses pendidikan formal di kota Palu,” vol. 10, no. 4, pp. 817–824, 2024.
- [15] T. A. Suryadinata and T. A. Suryadinata, “Dalam Problem Marginalisasi,” pp. 395–427, 2024.
- [16] J. Mackiewicz, *Fifth Edition-Research Design*. 2018. doi: 10.4324/9780429469237-3.
- [17] D. Assyakurrohim, D. Ikhram, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, “Case Study Method in Qualitative Research,” *J. Pendidik. Sains dan Komput.*, vol. 3, no. 01, pp. 1–9, 2022.
- [18] J. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications, Inc. 2015.
- [19] E. Setiawan, “Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar dalam Kajian Pierre Bourdieu,” *J. Al-Hikmah*, vol. 20, no. 1, pp. 55–64, 2022, doi: 10.35719/alhikmah.v19i2.72.
- [20] P. Bourdieu, *Bahasa dan kekuasaan Simbolik*, Cetakan pe. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- [21] A. Helen Suhasri, F. Ismail, and W. Afgani, “Pentingnya Nilai Afeksi Dalam Meningkatkan Sikap Religius Siswa,” *Adiba J. Educ.*, vol. 3, no. 2, pp. 273–278, 2023.
- [22] N. Maharani, N. Khoirunnisa, and S. P. Putri, “Analisis Masalah Kesenjangan Sosial Di Sekolah Dasar,” *Paradig. J. Multidiscip. Res. Innov.*, vol. 2, no. 01, pp. 1–16, 2024, doi: 10.62668/paradigm.v2i01.1053.
- [23] Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- [24] R. Jatmiko and M. Abdullah, “Habitus, Modal, dan Arena dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi Karya Pakne Puri Tinjauan Bourdieu,” *Sutasoma J. Sastra Jawa*, vol. 9, no. 1, pp. 100–115, 2021, doi: 10.15294/sutasoma.v9i1.47060.
- [25] S. Stit, P. Nusantara, and L. Ntb, “Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas Viii Mts. Baiturrahim Kabar Tahun Pelajaran 2019/2020,” *Ed. J. Edukasi dan Sains*, vol. 2, no. 2, pp. 252–268, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi>
- [26] H. E. SUNA, “Akademik Başarının Yordayıcıları: Sosyoekonomik Düzey ve Okul Türü,” *J. Econ. Cult. Soc.*, vol. 61, no. 1, 2020, doi: 10.26650/jecs2020-0034.
- [27] N. Handayani and W. Watiyah, “Peran Guru Bk Dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi Siswa Sma Al-Ikhlas,” *Muhafadzah*, vol. 2, no. 1, pp. 30–37, 2023, doi: 10.53888/muhafadzah.v2i1.575.
- [28] Y. V. Tea, M. O. Pio, F. A. Tini, and E. Tia, “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi,” *J. Pendidik. Inklusi Citra Bakti*, vol. 1, no. 1, pp. 75–87, 2023, doi: 10.38048/jpicb.v1i1.2121.
- [29] T. Yohanes, Y. S. M. Widiyastuti, D. Krismantoro, and B. H. C. Handoyo, “Kajian Ideologis Pancasila terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif,” *Pancasila J. Keindonesiaan*, vol. 02, no. 01, pp. 92–113, 2022, doi: 10.52738/pjk.v2i1.82.
- [30] S. A. Irawati, “Sekolah Inklusi antara Kenyataan dan Realita,” *DIKMAS J. Pengabdi. Masy.*, vol. 03, no. June, pp. 354–362, 2023, [Online]. Available: <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1979>
- [31] N. Martono, “Sekolah Inklusi Sebagai Arena Kekerasan Simbolik,” *Sosiohumaniora*, vol. 21, no. 2, pp. 150–158, 2019, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.18557.
- [32] N. I. Fatmawati, “Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik,” *Madani J. Polit. dan Sos. Kemasyarakatan*, vol. 12, no. 1, pp. 41–60, 2020, doi: 10.52166/madani.v12i1.1899.
- [33] P. W. Andini, A. Amirudin, and M. H. Purnomo, “Bullying sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan di Kalangan

- Siswa SMA Jakarta," *Endogami J. Ilm. Kaji. Antropol.*, vol. 2, no. 2, p. 119, 2019, doi: 10.14710/endogami.2.2.119-130.
- [34] T. Rosmawati, Samsaifil, and I. H. Wally, "Kekerasan Simbolik Verbal pada Lingkungan Pendidikan di SMP Negeri 3 Baubau," *JEC (Jurnal Edukasi Cendekia)*, vol. 5, no. 1, pp. 9–16, 2021, [Online]. Available: <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/JEC>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.